

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jansen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa terdapat pemisah hubungan antara pemilik dengan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan keagenan. *Principal* sebagai pemilik perusahaan yang akan memberikan kewenangan pada manajer untuk mengelola perusahaan. Teori agensi yaitu hubungan keagenan yang ditandai dengan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Brigham & Houston, 2006).

Eisenhardt, (1989) menjelaskan terdapat tiga asumsi sifat manusia yang menjadi landasan pada teori agensi yaitu:

- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi mada mendatang (*bounded rationality*)
- 3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

Bedasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia yang mendahulukan kepentingan pribadinya, dapat menyebabkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agent. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para prisipal, namun disisi lain manajer mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal inilah yang mendorong terjadinya asimetri informasi diantara keuda belah pihak. Kondisi tersebut terjadi karena manajer memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh investor, sehingga akan mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa infromasi dari prisipal.

Dalam teori agensi, agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipal-nya. Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan,

itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam praktik timbul masalah (*agency problem*), karena ada kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan *incentives* atas pengelolaan dana pemilik (Surya & Yustiandana, 2008).

Teori agensi berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka dan yakin bahwa manajer tidak menggelapkan atau menginvestasikan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Teori agensi merupakan dasar terdorongnya konsep *good corporate governance* terciptakan. Dengan adanya *good corporate governance* diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan agen. Sehingga informasi dalam pelaporan keuangan dapat akurat sebagai instrumen untuk pengambilan keputusan (Haryuni, 2020; dan Ifada & Kurniawan, 2004).

2.1.2 Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Rezaee, (2005) kecurangan laporan keuangan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Sedangkan Kardhianti & Srimindarti, (2022) berpendapat bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara menghilangkan, menambah atau mengubah informasi yang mampu mempengaruhi dan mengubah keputusan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk itu manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya agar dapat melaporkan kinerja yang baik.

Akan tetapi hasil kinerja manajemen mungkin saja belum sesuai dengan yang diinginkan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan. Dengan adanya benturan kepentingan tersebut yang menyebabkan terjadinya kecurangan (Anugerah, 2014).

Kecurangan laporan keuangan dalam ACFE, (2010) merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat secara sengaja atas informasi material yang bertujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dan memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan. Metode umum memanipulasi laporan keuangan termasuk mencatat pendapatan fiktif, menutupi kewajiban atau pengeluaran dan mengembangkan aset yang dilaporkan. Dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dan akan memberikan keuntungan bagi pihak yang telah melakukan kecurangan. Terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu:

1. Insentif atau tekanan, yaitu manajemen atau karyawan memiliki dorongan atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, yaitu keadaan yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, yaitu suatu perilaku yang membuat manajemen maupun karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur yang dilakukan.

Wicaksono & Chariri (2015) menjelaskan jika kecurangan laporan keuangan melibatkan skema seperti berikut:

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan yang meterial, dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Kelalaian yang disengaja peristiwa, transaksi, rekening, atau informasi penting lainnya dari laporan keuangan yang disusun.
3. Kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, pengakuan, laporan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.

4. Kelalaian yang disengaja pada pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berdasarkan prinsip akuntansi, kebijakan, dan nilai keuangan yang terkait.

2.1.3 Manajemen Laba

Kardhianti & Srimindarti, (2022) berpendapat manajemen laba merupakan salah satu keahlian yang dilakukan manajer dalam mengelola laba. Sehingga manajemen laba sering dijadikan pengukuran untuk indikator kecurangan laporan keuangan. Manajemen laba merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan metode akuntansi tertentu yang ada dan mengambil metode yang tepat untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan.

Triyani et al. (2019) menjelaskan manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Scott (2009) manajemen laba merupakan keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian.

Manajemen laba berfokus pada pelaksanaan penilaian dalam laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan dan untuk membuat laporan keuangan lebih informatif. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan (Jooste, 2011).

Menurut Scott, (2009), manajer akan melakukan manajemen laba karena didorong oleh beberapa motivasi yaitu:

a) Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Motivasi bonus ini ditandai dengan adanya kebijakan pemberian bonus atas pencapaian target untuk memacu semangat karyawan agar kinerja karyawan dapat meningkat. Tidak jarang ditemukan bahwa laba menjadi parameter dalam penilaian kinerja manajemen yang mengakibatkan manajemen (agen) berusaha untuk mengatur laba yang dilaporkan agar mendapatkan bonus.

b) Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Adanya tuntutan memenuhi kewajiban kontraktual mengakibatkan manajer harus memilih kebijakan akuntansi yang sesuai agar perusahaan tidak mendapatkan sanksi. Hal ini merupakan motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba agar dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang.

c) Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Demi menjadi perusahaan monopoli, perusahaan besar dan *industry strategic* melakukan penurunan *visibility* dengan menggunakan prosedur akuntansi sehingga laba bersih yang dilaporkan lebih kecil.

d) Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Penurunan laba dalam praktik manajemen laba dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga beban pajak tidak terlalu besar.

e) Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Pada saat mendekati periode pergantian CEO, CEO yang akan diganti akan melakukan manajemen laba dengan mengoptimalkan laba agar penilaian kinerja yang didapat memuaskan.

f) *Initial Public Offering* (IPO)

Dalam rangka menaikkan nilai pasar, bagi perusahaan yang pertama kali *go public*, manajemen laba pada laporan keuangan diharapkan dapat meingkatkan harga saham perusahaan.

g) Pemberian Informasi kepada investor (*Communicate Information to Investor*)

Para investor cenderung menilai suatu perusahaan dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang mencerminkan adanya laba juga dapat menarik para investor karena dapat menjadi bahan tinjauan untuk kemungkinan di masa depan.

2.1.4 Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *good corporate governance* merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (FCGI., 2001).

Good corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor jika mereka akan mendapatkan informasi yang sama dan lengkap dengan yang dimiliki oleh manajemen. Penerapan *good corporate governance* yang baik memerlukan proses yang baik, dimana manajerial dan *principal* dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan akhir, yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan juga meningkatnya nilai perusahaan. Adapun asas *good corporate governance* yang diperlukan untuk mencapai kesimbangan usaha dengan memperhatikan *stakeholder* yaitu (Tunggal & Tunggal, 2002):

a. Transparasi

Perusahaan harus menyediakan informasi-informasi perusahaan yang relevan dan material agar mudah diakses dan dimengerti oleh *stakeholder*. Hal ini diperlukan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis di perusahaan.

b. Akuntabilitas

Agar perusahaan dapat dikelola dengan benar dan sesuai dengan kepentingan *stakeholder*, maka perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan.

c. Bertanggungjawab

Perusahaan bertanggungjawab terhadap kondisi masyarakat dan juga kelestarian lingkungan khususnya disekitar perusahaan. selain itu, perusahaan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Independen

Untuk menjalankan *good corporate governan* yang baik, dibutuhkan adanya pemisah kepentingan atau tugas antar departemen, sehingga perusahaan dapat dikelola secara independen tanpa mendominasi masing-masing organ perusahaan ataupun mengintervensi satu dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Pelaksanaan kegiatan perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham maupun *stakeholder* berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

Surya & Yustiandana (2008), menjelaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* secara konsisten di perusahaan dapat memperluas kesempatan perusahaan untuk mendapatkan laba dan memiliki peran dalam pencegahan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini didukung dengan pendapat Wicaksono & Chariri (2015), bahwa *good corporate governance* sangat dibutuhkan dalam mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. *Good corporate governance* tidak hanya berperan dalam memenuhi kewajiban hukum, namun dapat berperan dalam menangkal potensi kecurangan pada perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen dalam perusahaan (Guna & Herawaty, 2010) sebagai berikut:

1. Komisaris Independen

Komisaris merupakan salah satu organ penting dalam perusahaan yang bertanggungjawab dan memiliki wewenang untuk mengawasi langkah yang diambil direksi. Adanya dewan komisaris diharapkan dapat membantu direksi dalam pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan cepat.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bersal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.

Komisaris independen paling sedikit berjumlah 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Adanya komisaris independen dalam dewan komisaris akan menguatkan kontrol atas keputusan manajer (Santoso, 2017).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, dan manajemen memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan mengenai perusahaan. Kepemilikan manajerial juga akan mengurangi masalah keagenan, karena kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen dengan pemegang saham. Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jansen & Meckling, 1976).

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi keuangan atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi dapat membantu pengawasan yang lebih efektif sehingga dapat mencegah perilaku oportunistik manajer dan membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan (Candradewi & Sedana, 2016).

4. Komite Audit

Komite audit merupakan organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Komite audit dibentuk dan diketuai oleh dewan komisaris independen untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 menyatakan bahwa komite audit bertugas

dan bertanggung jawab dalam menelaah informasi keuangan, memberikan pendapat apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan, menelaah atas ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan dan sebagainya. Anggota komite wajib memahani mengenai laporan keuangan dan paling penting sedikit terdapat satu anggota yang berlatar belakang dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Adanya anggota yang mempunyai keahlian tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tindak kecurangan laporan keuangan (Hadad, 2016; dan Surya & Yustiandana, 2008).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis manajemen laba dan *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran dalam rangka memperjelas kerangka berpikir dalam penelitian ini, berikut beberapa penelitian tersebut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan Hasil
Johan L. Perols & Barbara A. Lougee (2011)	The relation between earnings management and financial statement fraud	Penelitian ini menguji bagaimana manajemen laba berdampak pada kemungkinan perusahaan akan melakukan kecurangan laporan keuangan	Manajemen laba, kecurangan laporan keuangan	Regresi logistik, outlier, multikolinearitas, uji hipotesis, statistik deskriptif	Menghasilkan unexpected revenue per employee memiliki hubungan positif terhadap kecurangan laporan keuangan
H. Salim & Fenny Marietza (2017)	Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Good Corporate</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh	Kecurangan laporan keuangan, manajemen laba, dan	Regresi logistik, statistik deskriptif,	1)Manajemen berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan

	<i>Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan</i>	manajemen laba dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	<i>good corporate governance.</i>	pengujian hipotesis.	keuangan 2)Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 3)kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 4)dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 5) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 6) komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Agus Suryanto (2019)	Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap	Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh implementasi <i>good corporate</i>	komite audit, independensi dewan, kepemilikan institusional, manajerial	Uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian	Hasil pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> yang diprosikan dengan komite audit, komisaris

	Kinerja Keuangan	<i>governance</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.	kepemilikan, kinerja perusahaan	hipotesis, uji parsial	independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan ternyata ada pengaruh secara positif.
Oetary Triyani, Kamila, & Azwir (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderating	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kecurangan laporan keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi	Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Manajemen, Laporan Keuangan Kecurangan.	Uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastitas, uji autokorelasi dan uji koefisien determinasi	Hasil pengujian komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dengan manajemen laba sebagai variabel moderating berpengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
Feby Priswita & Salma Taqwa (2019)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance seperti kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit dan efektivitas kepemilikan institusional	Kecurangan laporan keuangan, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional	Statistik deskriptif, uji regresi logistik, uji kelayakan model, <i>omnibus test</i> , koefisien determinasi, uji simultan dan parsial	1)Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 2)Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 3)Komite audit tidak berpengaruh terhadap

		terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan			kecurangan laporan keuangan 4)Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
Oktaviani Kristina Kardhiant, Ceacilia Srimindarti (2022)	Pengaruh Manajemen Laba Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Menguji dan menganalisa mengenai pengaruh manajemen laba dan good corporate governance pada perusahaan manufaktur subsector pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.	Kecurangan laporan keuangan, Manajemen laba, Dewan komisaris, Komite audit	Analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis	1)Manajemen laba berpengaruh secara negatif terhadap kecurangan laporan keuangan 2) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 3) Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan 4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

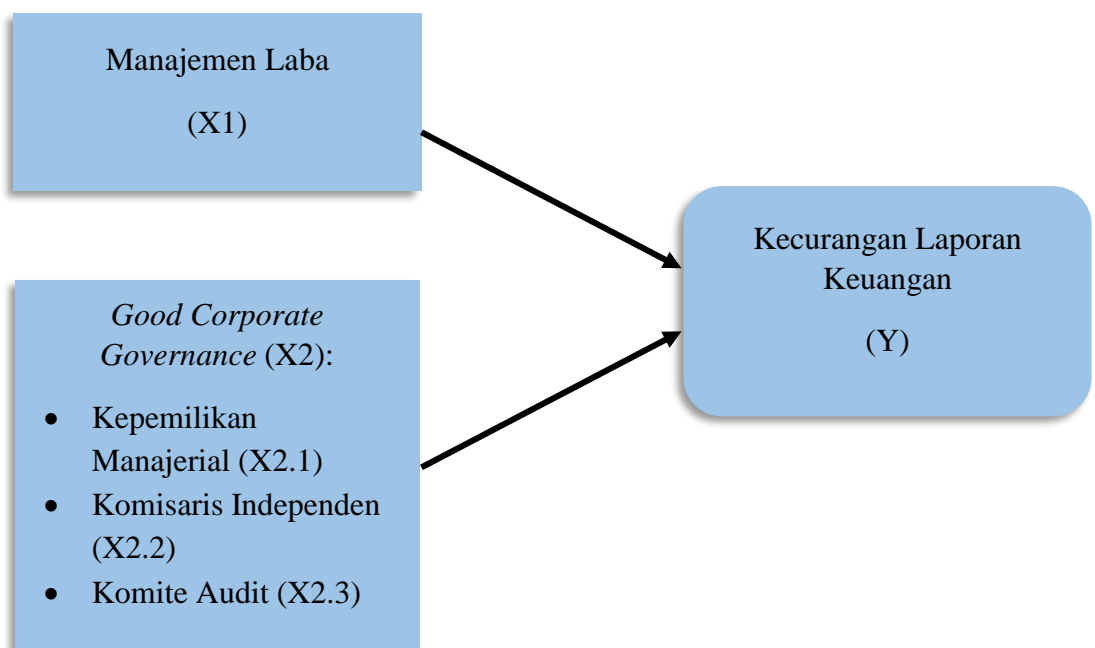
2.3 Model Konseptual Penelitian

Laporan keuangan perusahaan sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan. Namun jika perusahaan memanipulasi laporan keuangannya maka

akan berdampak bagi pihak internal dan eksternal. Kecurangan laporan keuangan dapat terjadi dikarenakan oleh kelalaian manusia yang mendapat tekanan atau dorongan dan diberi kesempatan untuk melakukan kecurangan serta suatu perilaku yang membuat manajemen maupun karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur yang dilakukan. Manajer juga melakukan manajemen laba yang mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada perusahaannya. Serta terdapat *good corporate governance* dimana sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh manajemen laba dan *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Berikut model konseptual penelitian yang dapat digambarkan:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Manajemen Laba

Manajemen memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dan *debtholders*, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk mekasimalkan kesejahteraan mereka sendiri sehingga menimbulkan masalah yang disebut dengan *agency; y problem* dalam *agency theory*. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diharapkan (Ifada & Kurniawan, 2004).

Puspatriisnanti & Fitritany, (2014) berpendapat bahwa perusahaan yang menggunakan akrual untuk menaikkan pendapatan harus bersiap dengan konsekuensi dari tindakannya ketika menemui hambatan fleksibilitas dalam manajemen laba. Salah satu konsekuensinya adalah harus melakukan *fraud* untuk menutupi atau meringankan akun akrual yang telah dimanipulasi dalam rangka mencapai tujuannya. Dechow & Skinner, (2000) berpendapat bahwa perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki *discretionary accruals* yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *fraud* pada periode tiga tahun sebelum terjadinya *fraud*.

Pendapatan yang meningkat dengan tidak wajar yang disajikan pada laporan keuangan akan mengindikasikan probabilitas terjadinya kecurangan dalam akun pendapatan. Namun, pengukuran pendapatan masih kurang valid dalam mendeteksi kecurangan sehingga perlu adanya modifikasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan penggunaan sumber daya seperti aset (produktivitas modal) dan karyawan (produktivitas tenaga kerja) yang dapat memberi sinyal kemungkinan terjadinya kecurangan (Perols & Lougee, 2011).

Manajemen laba yang di proksikan dengan *discretionary accrual dan unexpected revenue per employee*. Hasil dari penelitian Wang et al. (2010) menunjukkan bahwa manajemen laba secara signifikan memiliki hubungan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Pada penelitian Perols & Barbara (2011) menghasilkan *unexpected revenue per employee* memiliki

hubungan positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Salim & Marietza (2017) juga menunjukkan hasil bahwa *discretionary accrual dan unexpected revenue per employee* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Manajemen laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.4.2 *Good Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur perusahaan dan mengendalikan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen dalam perusahaan.

Jansen & Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial juga akan mengurangi masalah keagenan, karena kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen dengan pemegang saham. Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Penelitian yang dilakukan oleh Salim & Marietza (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajerial belum dapat mengatasi atau meminimalkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian Kardhianti & Srimindarti, (2022) menghasilkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan keuangan, kepemilikan dan hubungan

keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen. Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Komisaris yang berasal dari luar tidak memiliki kepentingan terhadap pihak internal perusahaan akan melakukan pengawasan yang lebih independen. Hal tersebut mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan dapat dicegah (Andayani, 2010; dan Salim & Marietza, 2017).

Penelitian Dwiputri et al., (2013) menghasilkan bahwa komisaris independen memiliki hubungan signifikan dengan kecurangan laporan keuangan. Semakin besar proporsi komisaris independen menandakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan lebih banyak dari dewan komisaris. Adanya pengawasan yang objektif dari komisaris independen dapat memperkecil peluang manajemen untuk melakukan kecurangan. Sedangkan dalam penelitian Salim & Marietza, (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Semakin banyak komisaris independen didalam dewan komisaris tidak mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan agent. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan permasalahan yang sering disebut dengan *agency problem* (Jansen & Meckling, 1976).

Penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satunya adalah komite audit. Komite audit berperan membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasan. Hal tersebut membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan agen, seperti celah untuk melakukan kecurangan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok.

Pada penelitian Priswita & Taqwa, (2019) komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena hasil rapat dari komite audit disampaikan kepada dewan komisaris, sehingga tergantung dari dewan komisaris melakukan tindak lanjut atas saran komite audit atau tidak. Penelitian Salim & Marietza (2017) menjelaskan bahwa komite audit masih belum dapat mengatasi masalah kecurangan laporan keuangan, dikarenakan ketika komite audit memiliki direktur independen maka kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan rendah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.